



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIANTA BANGUN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS UTAMA**
3. NHK : **164109**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.905.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 348 m2/199 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/245 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/194 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 350.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 271.970.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 430.982.082****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.957.952.082**

III. HUTANG **Rp. 852.925.016**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.105.027.066

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.